

BAB II

RINCIAN STRUKTUR *FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION* (FAO) DAN KONDISI DALAM WILAYAH SAHEL

Pada bab ini akan membahas secara rinci mengenai rincian struktur *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang terdiri dari latar belakang berdirinya FAO, kemudian membahas tujuan dibangunnya FAO itu sendiri, lalu penjelasan mengenai struktur FAO, dan sumber pendanaan. Bab ini juga akan membahas bagaimana mekanisme FAO di Sahel. Selanjutnya, kondisi wilayah Sahel juga dibahas secara rinci baik dari dimensi lingkungan, ekonomi, maupun krisis kelaparan yang sedang terjadi.

2.1 *Food and Agriculture Organization* (FAO)

Food and Agriculture Organization (FAO) adalah organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada bidang pangan dan pertanian. Terbentuknya organisasi ini adalah akibat adanya Perang Dunia, di mana perang ini menimbulkan banyak permasalahan yang salah satunya adalah masalah kebutuhan pangan (Dongyu, 2020). Peran FAO sebagai organisasi internasional dalam menanggapi meningkatnya krisis pangan dan gizi di Sahel, juga bekerja sama dengan berbagai pihak maupun beberapa organisasi lain. Salah satu upaya FAO untuk meningkatkan pangan di Sahel adalah membuat kerangka kerja respons strategis berjudul "*FAO Strategic Resilience Framework : Urgent Action to Support the Resilience of Vulnerable Populations*" dalam mendukung pemerintah nasional dan

dalam kemitraan dengan organisasi kemanusiaan lainnya yang beroperasi di Afrika Barat dan Sahel.

Inisiatif ini melibatkan intervensi regional dan nasional di Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, dan Chad. Pembuatan kerangka kerja tersebut digunakan untuk mengurangi konsekuensi negatif dari krisis pada rantai produksi dan pemasaran pangan sangat penting untuk melindungi mata pencaharian yang rentan secara efektif dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Kondisi yang mendorong pemulihan dan kemandirian harus diciptakan. Selanjutnya, memastikan ketersediaan, akses, dan konsumsi makanan bergizi, serta meningkatkan ketahanan masyarakat dan individu dengan fokus pada perempuan, yang memainkan peran penting di semua tingkat sistem pangan yang bervariasi, sangat penting. Tujuan keseluruhan program FAO yang direncanakan adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat rentan di Sahel (FAO, 2012b).

2.1.1 Latar Belakang Berdirinya *Food and Agriculture Organization* (FAO)

Banyaknya permasalahan pangan yang terjadi akibat adanya perang, tentunya hal ini semakin mengancam masyarakat terutama yang bermata pencaharian sebagai petani. Dalam buku yang ditulis Ralph W. Phillips dengan judul “FAO : *its origins, formation and evolution 1945-1981*”, ide pertama dibentuknya organisasi internasional untuk pangan dan pertanian ini muncul dan dicetuskan oleh David Lubin, seorang warga negara Amerika kelahiran Polandia, yang berprofesi sebagai pedagang di California. Ide ini kemudian didiskusikan dengan para Menteri di beberapa negara agar ide ini

dapat terwujud atau terealisasikan. Inisiasi yang dilakukan Lubin membawakan hasil, sehingga pada tahun 1905 dibentuklah suatu organisasi yang disebut *International Institute of Agriculture* (IIA). Selain itu, ide yang diusung Lubin juga mendapatkan persetujuan dari King Victor Emmanuele III di Italia setelah diadakannya Konferensi di Roma pada 7 Juni 1905 (Phillips, 1981).

Kemudian, Frank L. McDougall yang merupakan seorang ekonom melanjutkan jejak Lubin dengan membawa memorandumnya yang berjudul “*The Agricultural and the Health Problems*” ke forum internasional. Setelah memiliki pengalaman sebagai petani buah-buahan di Australia, McDougall percaya bahwa sebagian besar penduduk dunia tidak mendapatkan cukup jenis makanan yang tepat untuk dimakan, dan pandangan bahwa produksi makanan haruslah diperluas untuk memenuhi kebutuhan gizi, bukan dibatasi (Muir, 2012). Lalu, Stanley Bruce yang merupakan seorang politikus dan diplomat Australia, melakukan dialog kepada Majelis Liga Bangsa-Bangsa pada 11 September 1935. Ia membahas mengenai memorandum yang dibuat McDougall (Way, 2013).

Selanjutnya, selama diskusi pada Oktober 1942 mengenai *International Wheat Agreement* di Washington, McDougall menulis memorandum kedua dan berkonsultasi dengan sekelompok kecil yang kebanyakan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat. Draf memorandum ini berisi beberapa gagasan tentang bagaimana pemerintah dapat mengembangkan sebuah organisasi untuk menangani masalah pangan dan pertanian. Sehingga gagasan McDougall dalam memorandum menarik perhatian Eleanor Roosevelt yang merupakan istri dari presiden Amerika Serikat pada masa itu

yakni Franklin D. Roosevelt. Eleanor memutuskan bahwa gagasan yang terkandung di dalamnya layak untuk diperhatikan Presiden. Akhirnya, McDougall diundang untuk makan malam dengan sekelompok kecil di *White House*, di mana ia mendiskusikan gagasannya kepada Presiden Roosevelt untuk ditindaklanjuti (Lele & Goswami, 2021).

Kemudian dalam proses pembentukan FAO secara resmi, pada tahun 1935 dibentuklah komite ad hoc dalam Liga Bangsa-Bangsa dan pada tahun 1943 diadakan Konferensi *Hot Springs* di Virginia. Konferensi ini digelar atas inisiatif Presiden Roosevelt dan dihadiri 45 negara. Konferensi *Hot Springs* diakhiri dengan persetujuan tindakan akhir yang berisi 33 rekomendasi dan keinginan untuk membentuk Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Lalu, pembentukan konkrit dari organisasi ini dipercayakan kepada Komisi Sementara FAO, yang didirikan di Washington dengan perwakilan dari masing-masing pemerintah dan otoritas yang diwakili pada Konferensi *Hot Springs*. Akhirnya, dua tahun kemudian diadakanlah Konferensi Quebec pada 16 Oktober 1945, dan dari konferensi ini FAO resmi didirikan dan dibentuk (Phillips, 1978).

2.1.2 Tujuan *Food and Agriculture Organization* (FAO)

FAO adalah organisasi yang didirikan untuk meningkatkan tingkat dan standar gizi, menjamin peningkatan efisiensi produksi dan distribusi semua produk pangan dan pertanian, termasuk pengelolaan yang baik dan pemanfaatan sumber daya nasional secara berkelanjutan. Selain itu FAO juga berkontribusi untuk meningkatkan kondisi masyarakat pedesaan yang lebih baik. FAO memiliki mandat yang luas mencakup

nutrisi, pangan dan pertanian, termasuk perikanan, produk laut, dan kehutanan. FAO membahas seluruh rantai makanan, dari produksi hingga konsumsi, dan mencakup pemrosesan bahkan perdagangan. Dengan keanggotaan yang meliputi hampir semua negara-negara belahan dunia, FAO menawarkan forum global yang unik untuk membuat aturan internasional dan konvergensi maupun koordinasi kebijakan di bidang-bidang ini (OECD & FAO, 2016).

FAO didirikan agar dapat menjamin kelangsungan hidup manusia di seluruh belahan dunia dan memastikan semua orang memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang berkualitas, sehingga angka kelaparan dapat berkurang. Sejak berdirinya FAO pada tahun 1945, FAO memiliki beberapa tujuan utama.

Pertama, FAO didirikan dengan tujuan utama untuk membantu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat global dan konsumsi nutrisi harian mereka agar terhindar dari kelaparan, kerawanan pangan, dan malnutrisi (FAO Legal and Ethics Office, 2016).

Kedua, menjadikan pertanian lebih produktif dan berkelanjutan. Pertumbuhan di sektor pertanian merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai ketahanan pangan (ten & Patrão, 2021).

Ketiga, mengurangi kemiskinan pedesaan. Perlu diketahui bahwa sebagian besar orang miskin dunia tinggal di daerah pedesaan (FAO Legal and Ethics Office, 2016). Pada tahun 1990, 54% dari mereka yang tinggal di daerah pedesaan di negara berkembang hidup dengan kurang dari \$1,25 per hari dan dianggap sangat miskin (United Nations, 2013a).

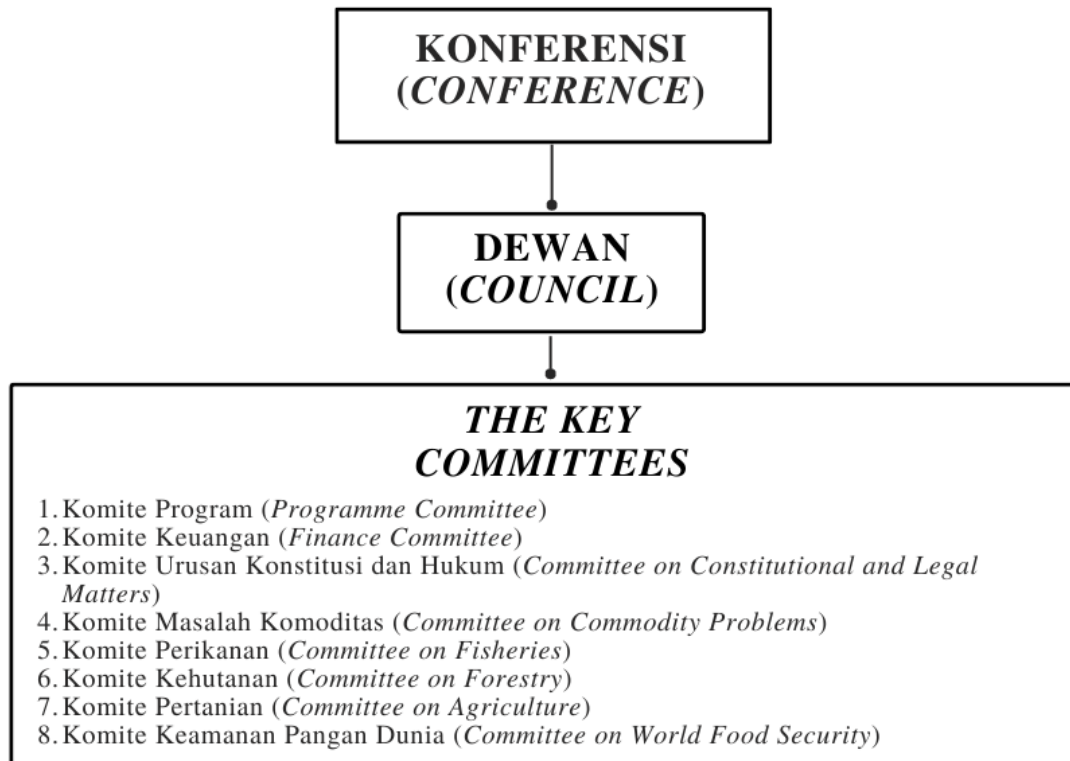
Keempat, melindungi mata pencaharian dari bencana. Setiap tahun, jutaan orang yang bergantung pada produksi, pemasaran dan konsumsi pada tanaman, ternak, ikan, hutan dan sumber daya alam lainnya dihadapkan pada bencana dan krisis. Bencana yang ada bisa menyerang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Sehingga hal ini mengancam produksi dan akses ke makanan pada tingkat lokal, nasional, bahkan regional dan global (United Nations, 2013a).

Dalam hal ini, FAO telah berpartisipasi dalam ribuan proyek lapangan untuk memberikan bantuan, pengalaman, dan keahlian kepada negara yang mengalami krisis kelaparan. Proyek yang dijalankan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan mengurangi krisis kelaparan pada negara tersebut.

2.1.3 Struktur *Food and Agriculture Organization* (FAO)

FAO memiliki struktur organisasi yang di dalamnya terdapat Konferensi (*Conference*), Dewan (*Councils*), dan *The Key Committees*. Berikut merupakan gambaran struktur badan lengkap dari FAO.

Gambar 2.1 Struktur *Food and Agriculture Organization (FAO)*



Sumber : FAO (2022)

Konferensi (*Conference*) FAO merupakan badan pengatur tertinggi dalam organisasi. Setiap pemerintah anggota dapat mengirimkan satu delegasi ke Konferensi dan memiliki satu suara (FAO, 2017a). Menurut pemerintah masing-masing, delegasi dapat didampingi oleh pengganti, rekan, dan penasihat. Selain itu, Konferensi diperlukan dalam banyak hal seperti penerimaan negara anggota baru, memilih Anggota Dewan, mengangkat Direktur Jenderal dan Ketua Independen Dewan, meninjau dan menyetujui program kerja organisasi, memutuskan tingkat anggarannya, menetapkan skala kontribusi, meninjau keadaan pangan dan pertanian, membuat

keputusan tentang administrasi dan pertanyaan konstitusional, membahas topik-topik khusus yang termasuk dalam agendanya, serta menentukan lokasi permanen markas besar FAO (Phillips, 1981).

Sedangkan, Dewan (*Councils*) adalah badan pengatur tingkat kedua FAO yang berfungsi sebagai badan pengatur selama sesi-sesi konferensi dan mengadakan setidaknya satu sesi skala penuh setiap tahun di samping sesi-sesi singkat sebelum dan sesudah sesi-sesi Konferensi. Saat ini, Dewan terdiri dari 49 negara anggota yang dipilih oleh Konferensi. Selain itu, tugas yang dilakukan Dewan dilakukan di bawah kepemimpinan seorang Ketua Independen, yang juga dipilih oleh Konferensi. Secara khusus, Dewan menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan situasi pangan dan pertanian dunia dan hal-hal terkait kegiatan-kegiatan organisasi saat ini dan yang akan datang, termasuk program kerja dan anggarannya, masalah-masalah administrasi dan pengelolaan keuangan organisasi dan hal-hal konstitusional (FAO, 2017a).

Di bawah Dewan terdapat *The Key Committees* yang terdiri dari beberapa komite. Pasal V Konstitusi FAO membahas tentang Dewan Organisasi. Pasal ini mengatur agar dewan dibantu oleh delapan komite. Komite-komite tersebut terdiri dari Komite Program (*Programme Committee*), Komite Keuangan (*Finance Committee*), Komite Urusan Konstitusi dan Hukum (*Committee on Constitutional and Legal Matters*), Komite Masalah Komoditas (*Committee on Commodity Problems*), Komite Perikanan (*Committee on Fisheries*), Komite Kehutanan (*Committee on Forestry*), Komite Pertanian (*Committee on Agriculture*), dan Komite Keamanan Pangan Dunia (*Committee on World Food Security*) (FAO, 1975).

Pertama adalah Komite Program (*Programme Committee*). Komite Program beranggotakan perwakilan dari 12 Negara Anggota dan seorang Ketua yang dipilih oleh Dewan dari wilayah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Konferensi untuk tujuan pemilihan Dewan. Komite Program memiliki tugas untuk membantu Dewan dalam melaksanakan tugasnya mengenai pengembangan dan pelaksanaan kegiatan program Organisasi (FAO, 2021).

Kedua adalah Komite Keuangan (*Finance Committee*). Komite Keuangan beranggotakan perwakilan dari 12 Negara Anggota dan seorang Ketua yang dipilih oleh Dewan yang memiliki keahlian khusus dalam administrasi dan keuangan. Sehingga, Komite Keuangan memiliki tugas untuk membantu Dewan dalam masalah administrasi dan keuangan Organisasi (FAO, 2022c).

Ketiga adalah Komite Urusan Konstitusi dan Hukum (*Committee on Constitutional and Legal Matters*). Komite ini beranggotakan perwakilan dari 7 negara anggota dan ketua yang dipilih oleh Dewan. Komite Urusan Konstitusi dan Hukum memiliki tugas untuk mempertimbangkan hal konstitusional dan hukum tertentu yang dirujuk oleh Dewan atau Direktur Jenderal dari Aturan Umum Organisasi (FAO, 2017a).

Keempat adalah Komite Masalah Komoditas (*Committee on Commodity Problems*). Berdasarkan Kerangka acuan Komite sebagaimana diatur dalam Peraturan XXIX Peraturan Umum Organisasi meliputi, Komite Masalah Komoditas memiliki beberapa tugas seperti menjaga masalah komoditas yang bersifat internasional yang mempengaruhi produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi, serta masalah

ekonomi; menyiapkan survei faktual dan interpretatif tentang situasi komoditas dunia yang akan tersedia langsung bagi negara-negara anggota; dan melaporkan dan menyampaikan saran-saran kepada Dewan tentang isu-isu kebijakan yang timbul dari pertimbangannya, dan memanfaatkan laporan-laporan ini dan laporan-laporan dari badan-badan pendukungnya kepada negara-negara anggota untuk informasi mereka (FAO, 2016c).

Kelima adalah Komite Perikanan (*Committee on Fisheries*). Komite Perikanan memiliki beberapa tugas seperti melakukan tinjauan umum berkala terhadap masalah perikanan internasional dan mengkaji kemungkinan solusi melalui program nasional FAO dan antar pemerintah; meninjau hal-hal khusus yang berkaitan dengan perikanan yang dirujuk kepada Komite oleh Dewan atau Direktur Jenderal, atau ditempatkan oleh Komite pada Agendanya atas permintaan negara anggota sesuai dengan aturan prosedur Komite, dan untuk membuat rekomendasi yang mungkin sesuai; mempertimbangkan keinginan untuk mempersiapkan dan menyerahkan kepada negara-negara anggota sebuah konvensi internasional berdasarkan Pasal XIV Konstitusi untuk memastikan kerja sama dan konsultasi internasional yang efektif di bidang perikanan pada skala dunia; serta melaporkan kepada Dewan dan memberikan nasihat kepada Direktur Jenderal, sebagaimana mestinya mengenai hal-hal yang dipertimbangkan oleh Komite (FAO, 2017a).

Keenam adalah Komite Kehutanan (*Committee on Forestry*). Komite Kehutanan memiliki beberapa tugas seperti melakukan tinjauan berkala terhadap masalah kehutanan internasional dan menilai masalah ini dengan maksud untuk

mengusulkan tindakan bersama yang akan dilakukan oleh negara-negara anggota dan Organisasi dalam penyelesaiannya; mengkaji program kerja organisasi di bidang kehutanan dan pelaksanaannya; memberikan nasihat kepada Direktur Jenderal tentang program kerja organisasi di bidang kehutanan di masa depan dan pelaksanaannya; meninjau hal-hal khusus yang berkaitan dengan kehutanan yang dirujuk ke Komite oleh Dewan atau Direktur Jenderal, atau ditempatkan oleh Komite dalam agendanya atas permintaan negara anggota sesuai dengan aturan prosedur Komite, dan membuat rekomendasi yang mungkin sesuai; serta melaporkan kepada Dewan dan memberikan nasihat kepada Direktur Jenderal, sebagaimana mestinya, mengenai hal-hal yang dipertimbangkan oleh Komite (FAO, 2022b).

Ketujuh adalah Komite Pertanian (*Committee on Agriculture*). Komite Pertanian memiliki beberapa tugas seperti melakukan tinjauan berkala dan penilaian atas dasar yang sangat selektif mengenai masalah pertanian dan gizi, dengan maksud untuk mengusulkan tindakan bersama oleh negara-negara anggota dan organisasi; memberi nasihat kepada Dewan tentang keseluruhan program kerja jangka menengah dan panjang organisasi yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan, pangan dan gizi, dengan penekanan pada integrasi semua aspek sosial, teknis, ekonomi, kelembagaan dan struktural yang berhubungan dengan pembangunan pertanian dan pedesaan secara umum; meninjau program kerja dua tahunan organisasi dan pelaksanaannya di bidang-bidang yang termasuk dalam kompetensi Komite; meninjau hal-hal khusus yang berkaitan dengan pertanian, pangan dan gizi yang dirujuk ke Komite oleh Konferensi, Dewan atau Direktur Jenderal, atau ditempatkan oleh Komite

dalam agendanya atas permintaan negara anggota sesuai dengan Aturan Prosedur Komite, dan membuat rekomendasi yang mungkin sesuai; serta melaporkan kepada Dewan dan memberikan saran kepada Direktur Jenderal, sebagaimana mestinya, mengenai masalah lain yang dipertimbangkan oleh Komite (FAO, 1979).

Terakhir adalah Komite Keamanan Pangan Dunia (*Committee on World Food Security*). Komite Keamanan Pangan Dunia memiliki beberapa tugas sebagai koordinasi di tingkat global di mana menyediakan platform untuk diskusi dan koordinasi untuk memperkuat aksi kolaboratif antara pemerintah, organisasi regional, organisasi dan lembaga internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi produsen pangan, organisasi sektor swasta, organisasi filantropi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dengan cara yang selaras dengan konteks dan kebutuhan spesifik setiap negara; sebagai konvergensi kebijakan di mana mempromosikan konvergensi dan koordinasi kebijakan yang lebih besar, termasuk melalui pengembangan strategi internasional dan pedoman sukarela tentang ketahanan pangan dan gizi berdasarkan praktik terbaik, pembelajaran dari pengalaman lokal, masukan yang diterima dari tingkat nasional dan regional, serta saran dan pendapat ahli dari berbagai pemangku kepentingan; serta sebagai dukungan dan saran untuk negara dan wilayah. Atas permintaan negara dan/atau wilayah, Komite Keamanan Pangan Dunia memfasilitasi dukungan dan/atau saran dalam pengembangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi nasional dan regional mereka untuk penghapusan kelaparan, pencapaian ketahanan pangan dan penerapan praktis dari

“*Voluntary Guidelines for the Right to Food*” yang didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (FAO, 2017a).

2.1.4 Sumber Pendanaan *Food and Agriculture Organization* (FAO)

Sumber dana utama yang digunakan oleh FAO untuk menjalankan misi-misi atau kegiatannya berasal dari iuran dari negara anggota dalam FAO serta dana himpunan dari negara anggota, dan *United Nations Development Programme* (UNDP).

Selain negara anggota, sumber pendanaan misi atau kegiatan FAO berasal dari negara donor. Tujuan pendanaan donor adalah menjadikan FAO sebagai pelaksana dari program bantuan negara donor untuk meningkatkan pangan di negara berkembang. Program ini disebut *Trust Fund* (TF). Misi atau kegiatan yang akan didanai dari *Trust Fund* FAO akan membantu pemerintah negara anggota dalam memulai, memperkuat, mempercepat dan memperluas kegiatan di tiga bidang yakni *Food Security*, *Emergency Prevention of Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases*, dan *Assistance in Project and Programme Studies to Increase Investment*. *Trust Fund* FAO ini akan dibiayai oleh kontribusi sukarela yang diberikan oleh pemerintah, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah dan sektor swasta (FAO, 2015c). Namun demikian, sumber pendanaan terbesar untuk misi atau kegiatan FAO bersumber dari program bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dialirkan melalui UNDP.

Di samping itu, FAO juga melakukan penggalangan dana berbentuk program yang biasa dikenal dengan *TeleFood*. *TeleFood* adalah kampanye, konser, dan acara tahunan FAO yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kelaparan dunia

dan menggalang dana untuk mendukung misi-misi atau kegiatan untuk penanggulangan kelaparan (Campbell, 2009). Selain itu, *Telefood* memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di berbagai negara dunia dengan sosialisasi cara bertani dengan metode yang lebih efisien agar lahan mereka mampu memproduksi jumlah hasil panen yang berjumlah signifikan (Campbell, 2009).

Kampanye *TeleFood* berpusat pada peringatan Hari Pangan Sedunia, menandai berdirinya FAO pada 16 Oktober 1945. Sejak dimulai pada tahun 1997, program *TeleFood* telah mengumpulkan dana lebih dari US\$9 juta. Adanya program ini telah membiayai lebih dari 1000 kegiatan atau misi *TeleFood* pada 100 negara lebih di seluruh dunia. Sumbangan yang diterima untuk *TeleFood* langsung disalurkan, tanpa biaya administrasi, kepada petani miskin untuk membantu mereka mencapai kapasitas untuk menghasilkan makanan yang lebih banyak dan lebih baik untuk keluarga mereka. *TeleFood* memberi petani miskin alat untuk bercocok tanam, memelihara ternak dan ikan, mengolah makanan untuk menjualnya dengan harga yang lebih baik (FAO, 2013a).

Sehingga, dari seluruh dana yang terkumpul, FAO mengalokasikannya ke berbagai negara di belahan dunia secara rinci dan bertahap berdasarkan program yang dilaksanakan di negara tersebut. Dana ini kemudian dapat digunakan oleh negara tersebut melalui program atau misi yang dilaksanakan oleh FAO untuk meningkatkan ketahanan pangan.

2.2 Mekanisme FAO di Sahel

Pada subbab ini akan membahas mengenai mekanisme FAO dalam merumuskan program bantuan di Sahel dan pertimbangan apa saja yang dilakukan FAO dalam melaksanakan misi peningkatan ketahanan pangan di Sahel.

2.2.1 Mekanisme FAO dalam Merumuskan Program Bantuan

Setiap misi bantuan kemanusiaan yang akan dilakukan oleh FAO harus melewati berbagai prosedur dan mekanisme sebelum program tersebut diterapkan. Pada dasarnya, hal-hal terkait kerja sama dengan negara ataupun organisasi diatur dalam artikel 13 konstitusi FAO, yang mana Konferensi sebagai badan pengatur tertinggi dalam organisasi menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk menjamin konsultasi yang tepat sasaran antara FAO dengan pemerintah, lembaga nasional, atau pihak swasta (FAO, 2017a).

Pernyataan prosedur dalam menjamin koordinasi antara FAO dengan aktor negara ataupun non-negara sejalan dengan beberapa poin empat pilar implementasi keberlanjutan di sektor pangan dan pertanian oleh FAO, yaitu pilar integrasi di seluruh sektor bersamaan dengan pilar kolaborasi. Pilar integrasi di seluruh sektor menekankan pada implementasi program dengan pendekatan yang terintegrasi mulai dari keterlibatan seluruh *stakeholders*. Sementara pilar kolaborasi menekankan pada kerja sama dan partisipasi setiap pihak dalam proses program mewujudkan ketahanan pangan (FAO, 2014b).

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam programnya, FAO memastikan implementasi misi tersebut memiliki empat jenis area tindakan, yaitu pembuktian, dialog, perangkat, dan praktik perubahan. Keempat area tindakan tersebut saling bersinergi satu dengan yang lainnya, yang mana sebuah dialog untuk membangun wawasan program harus didasari pembuktian valid sehingga nantinya dapat menentukan perangkat yang digunakan dalam mencapai perubahan (FAO, 2014b). Tidak hanya itu, FAO dalam merumuskan program juga mengikutsertakan berbagai komponen seperti kerangka kerja strategis jangka panjang terkait isu pangan selama 10 hingga 15 tahun, rencana jangka menengah selama empat tahun, tujuan strategis yang harus dicapai oleh negara anggota dengan dukungan dari organisasi, dan program kerja serta anggaran yang mencakup periode dua tahunan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dikeluarkan (FAO, 2017a).

Oleh karena itu, baik FAO atau negara anggota dalam mengajukan program terkait misi, seperti meningkatkan ketahanan pangan, harus melewati mekanisme formulasi *Country Programming Framework* (CPF) sehingga setiap negara yang hendak berkolaborasi dengan FAO berkesempatan untuk dapat mengajukan program asistensi.

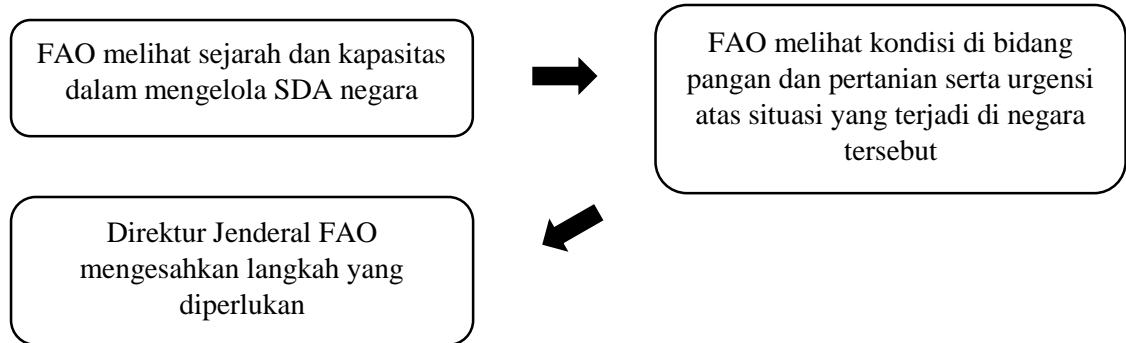
Pada dasarnya, CPF merupakan suatu kerangka program yang menetapkan prioritas pembangunan untuk kolaborasi antara FAO bersama negara anggota dengan keluaran yang akan dicapai nantinya berkontribusi pada prioritas nasional, regional, dan hasil perusahaan serta sumber daya kemitraan yang diperlukan. Selain itu, CPF juga harus mencakup penyediaan intervensi bantuan darurat saat diperlukan, tetapi

tetap mengacu pada pembangunan jangka panjang (FAO, 2015g). Nantinya program FAO di bawah CPF akan diintegrasikan ke dalam bidang-bidang yang menjadi fokus utama, yang mana formulasi program tersebut nantinya didasarkan pada prioritas pemerintah negara penerima bantuan (FAO, 2022a).

Oleh karena itu, hasil formulasi CPF diharapkan dapat menghasilkan program bantuan yang berguna bagi negara penerima secara jangka panjang sejalan dengan prioritas sektor-sektor tertentu. CPF juga merefleksikan kontribusi FAO dalam penerapan program-program PBB sehingga kerangka kerja tersebut harus diselaraskan dengan *United Nations Development Assistance Framework* (UNDAF) atau kerangka kerja sejenis dan arahan dari *United Nations Development Group*.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan FAO apabila sebuah negara mengajukan CPF atau organisasi akan melakukan program di wilayah tertentu. FAO akan melakukan asesmen sejarah di negara penerima bantuan dan kapasitasnya dalam mengelola sumber daya yang ada secara finansial ataupun teknis (FAO, 2015b). Selain itu, FAO juga melihat bagaimana kondisi negara tersebut, khususnya di bidang pangan dan pertanian. Salah satu prioritas utama yang memenuhi pertimbangan ini adalah urgensi atas situasi yang terjadi di negara tersebut, seperti adanya ketidakstabilan politik dan sosial atau krisis pangan, yang mana nantinya Direktur Jenderal akan mengesahkan langkah yang diperlukan (FAO, 2017b).

Gambar 2.2 Pertimbangan FAO dalam Memberikan Bantuan/Program



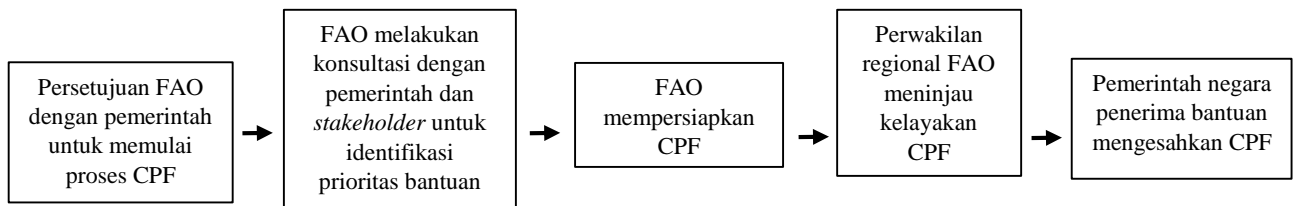
Sumber : FAO (2015b); FAO (2017b)

Selanjutnya, terdapat tiga fase dalam formulasi dan implementasi CPF atau yang disebut sebagai *CPF Cycle*. *CPF Cycle* terdiri atas formulasi dan pemantauan; implementasi; serta pengawasan, pelaporan, dan evaluasi (FAO, 2015g).

Fase formulasi dan persetujuan merupakan fase pertama dalam perumusan CPF, yang mana perwakilan FAO akan melakukan konsultasi secara inklusif dengan mitra pemerintah bersama *stakeholders* untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas negara tersebut beserta program bantuan yang tepat. Terdapat lima langkah dalam fase pertama, langkah pertama merupakan persetujuan antara FAO dengan pemerintah negara penerima bantuan untuk memulai proses CPF, yang mana membutuhkan pemetaan awal, pengumpulan wawasan terkait negara atau regional penerima bantuan, dan pembentukan institusi yang bertanggung jawab atas implementasi CPF. Selanjutnya langkah kedua terdiri dari dua capaian, yaitu dialog tingkat tinggi antara FAO dengan pemerintah ataupun *stakeholders* yang terlibat serta identifikasi prioritas

bantuan yang dibutuhkan, yang mana setidaknya dua area prioritas menjadi fokus utama. Dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu mempersiapkan CPF yang berisi target capaian, keluaran, kebutuhan sumber daya, dan kebutuhan kerja sama teknis. Kemudian langkah keempat yaitu tinjauan dari perwakilan regional FAO untuk meninjau kelayakan CPF yang kemudian disahkan. Terakhir langkah kelima merupakan pengesahan CPF oleh pemerintah negara penerima bantuan dari FAO (FAO, 2017a).

Gambar 2.3 Fase formulasi dan persetujuan dalam perumusan CPF



Sumber : FAO (2017a)

Setelah fase pertama dijalankan dan CPF disahkan, kemudian masuk ke fase kedua yang merupakan implementasi dari CPF dengan intervensi dari FAO terhadap negara yang mengikuti beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain mengelola untuk hasil yang berkaitan erat dengan implementasi CPF, kepemimpinan pengawasan atas implementasi program di negara penerima bantuan, akuntabilitas keuangan program, serta fleksibilitas untuk beradaptasi dalam segala kondisi. Fase kedua

berfokus pada bagaimana CPF dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memenuhi target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya (FAO, 2017a). Oleh karena itu, perwakilan dari FAO juga memiliki tanggung jawab sebagai pengawas implementasi dan berkoordinasi dengan aktor negara dalam eksekusi program agar tetap sejalan dengan hasil yang diharapkan.

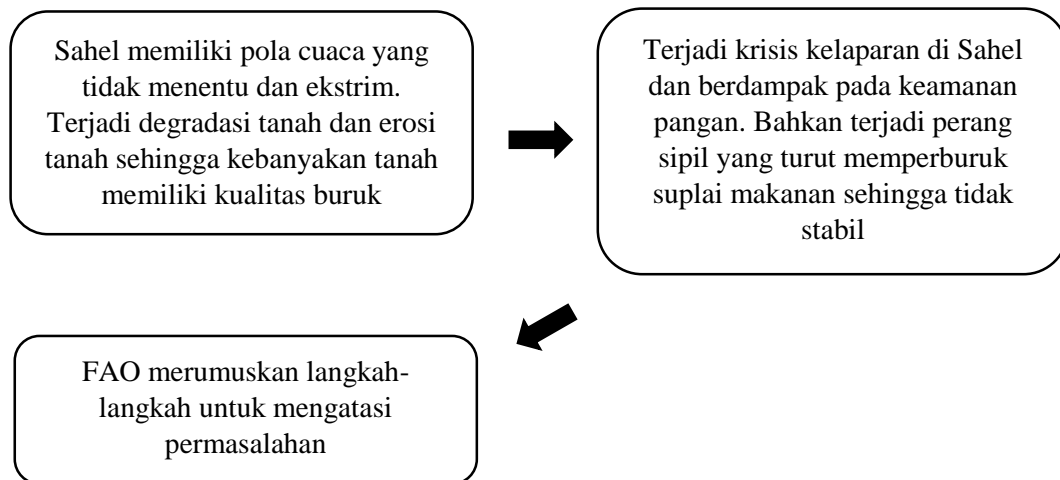
Fase ketiga dalam CPF adalah fase pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Ada dua tujuan utama dari fase ini, yaitu menyediakan informasi terhadap *stakeholders* terkait perkembangan program dan memberikan ruang bagi *stakeholders* agar terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk secara teratur mengarahkan strategi agar mencapai hasil yang diharapkan. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan oleh tim keuangan, dilanjutkan dengan peninjauan perkembangan program. Selanjutnya pelaporan dilakukan oleh perwakilan FAO kepada pemerintah dan korporat yang kemudian dimasukkan ke dalam laporan tahunan. Langkah selanjutnya adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir CPF oleh perwakilan FAO tiap tahunnya untuk menentukan bagaimana capaian dan kontribusi organisasi terhadap perkembangan sekaligus menginformasikan adanya CPF baru (FAO, 2014b).

2.2.2 Pertimbangan FAO dalam Melaksanakan Misi Peningkatan Ketahanan Pangan di Sahel

Melihat dari kriteria yang diberikan FAO dalam mengajukan program bantuan dan mekanisme formulasinya, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan FAO

untuk melakukan misi peningkatan ketahanan pangan sebagai upaya untuk mengatasi krisis kelaparan di Sahel.

Gambar 2.4 Pertimbangan FAO dalam Melaksanakan Misi di Sahel



Sumber : Abdi et al (2013); United Nations (2013c); FAO (2012a); Okpara et al (2015)

Hal pertama yang menjadi dasar pertimbangan FAO dalam memulai misi di Sahel adalah sejarah dan pengelolaan sumber daya alam yang buruk di Sahel. Wilayah Sahel dikenal dengan lingkungan semi-kering yang dicirikan oleh iklim yang bervariasi sehingga memiliki pola cuaca yang tak terduga dan tergolong ekstrim. Pengelolaan sumber daya di Sahel juga tergolong buruk, salah satu akibatnya adalah terjadi degradasi tanah dan erosi tanah (Abdi et al., 2013) . Hal ini terjadi karena berbagai faktor termasuk variasi iklim dan aktivitas manusia. Faktor manusia yang utama adalah tekanan dari pertumbuhan penduduk. Meskipun faktor iklim dan manusia dapat bertindak secara independen, mereka juga dapat memiliki efek satu sama lain.

Kekeringan yang berulang, bersama dengan kesuburan tanah yang rendah adalah beberapa faktor utama bagi orang-orang yang bermigrasi dari desa mereka (Cooper, 2018).

Pertimbangan kedua adalah kondisi dan urgensi dari Sahel. Sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan pembangunan terendah, Sahel memiliki berbagai masalah struktural yang berdampak pada beberapa sektor. Salah satunya adalah krisis kelaparan dan keamanan pangan, yang mana memiliki dampak secara luas di wilayah Sahel (United Nations, 2013b).

Kondisi kerawanan pangan merupakan salah satu isu yang disorot dan menjadi perhatian oleh dunia internasional (Conceição et al., 2016). Meskipun telah dilakukan berbagai usaha untuk mengatasi kondisi kerawanan pangan di berbagai wilayah di dunia, pada kenyataannya, masih banyak wilayah yang belum mampu mengatasi fenomena kerawanan pangan di wilayahnya, salah satunya adalah wilayah Sahel di Sub-Sahara Afrika (Conceição et al., 2016).

Selain itu, adanya pola cuaca yang ekstrim bahkan kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian di wilayah Sahel. Hal ini tentu saja berdampak pada ketahanan pangan yang ada. Dilansir dari artikel milik Cheikh Mbow, cuaca dan iklim memiliki andil yang berpengaruh dalam sektor pertanian pada suatu negara (Mbow et al., 2019). Peralpnya, tanaman membutuhkan komposisi udara yang baik agar mampu mencapai tingkat panen yang memuaskan. Terdapatnya berbagai komposisi zat yang tidak baik bagi tanaman seperti CO₂, CH₄, dan O₃ mengakibatkan fenomena gagal panen di berbagai wilayah di dunia, termasuk Sahel (Mbow et al., 2019).

Adanya degradasi dan erosi tanah juga turut memperburuk keadaan geografis di wilayah Sahel. Hal ini mengakibatkan setidaknya lebih dari 1,4 juta anak-anak terancam mengalami malnutrisi di tahun 2013 (United Nations, 2013b). Selain itu, produksi pangan di Sahel turut menurun drastis karena rendahnya curah hujan dan kekeringan yang tinggi sehingga produksi sereal lebih rendah (FAO, 2012a). Tidak hanya itu, harga bahan pokok yang tinggi dan ketidakmampuan masyarakat untuk pulih dari krisis pangan juga berkontribusi terhadap krisis pangan di wilayah Sahel.

Pertimbangan FAO lainnya dalam menurunkan program bantuan untuk wilayah Sahel adalah perang sipil yang terjadi di wilayah tersebut. Pertimbangan FAO lainnya dalam menurunkan program bantuan untuk wilayah Sahel adalah perang sipil yang terjadi di wilayah tersebut. Menurut laporan dari *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) situasi konflikual yang terjadi di wilayah Sahel mengakibatkan berbagai masalah sosial seperti kelaparan dan malnutrisi (OCHA, 2014).

Perang sipil antara pemerintah Mali dengan kelompok pemberontak telah menyebabkan lebih dari 283 ribu orang harus mengungsi, termasuk setidaknya 160 ribu orang yang mencari perlindungan di negara sekitar seperti Mauritania, Niger, dan Burkina Faso (FAO, 2012a). Hal ini menyebabkan suplai makanan di wilayah Sahel menjadi tidak stabil karena meningkatnya kebutuhan akan pangan yang berbanding terbalik dengan ketersediaannya. Situasi tersebut dapat dilihat dari keamanan pangan keluarga di Mali yang mengkhawatirkan, ditambah sulitnya masyarakat dalam mendapatkan akses makanan sehingga meningkatkan risiko kematian akibat malnutrisi

(Guilbert, 2015). Selain itu, konflik lain juga terjadi di Danau Chad yang disebabkan oleh sengketa air sehingga memicu perselisihan antar masyarakat Nigeria, Niger, Chad, dan Kamerun untuk merebut wilayah air dan sumber daya alam di dalamnya (Okpara et al., 2015). Oleh karena itu, konflik yang terjadi di Mali dan Danau Chad juga meningkatkan urgensi FAO untuk membuat program dalam mengatasi krisis pangan di wilayah Sahel.

Dari beberapa pertimbangan tersebut, Sahel memenuhi kriteria FAO sebagai wilayah yang menjadi prioritas bantuan dengan komitmennya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan. Dasar pertimbangan tersebut juga menjadi acuan FAO untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk mengatasi krisis pangan yang ada yakni dengan meningkatkan ketahanan pangan.

2.3 Kondisi Wilayah Sahel

Subbab ini akan menjelaskan mengenai kondisi wilayah Sahel yang dilihat dari dimensi lingkungan dan ekonomi. Dua dimensi ini penting karena memberikan dampak pada ketahanan pangan yang ada di wilayah Sahel.

2.3.1 Dimensi Lingkungan

Wilayah Sahel di Afrika adalah daratan seperti busur sepanjang 3.860 kilometer yang terletak di sebelah selatan Gurun Sahara dan membentang dari timur ke barat melintasi luasnya benua Afrika (Suleiman, 2017). Secara historis Sahel telah dicirikan oleh variasi iklim yang kuat dan curah hujan yang tidak teratur. Berbagai faktor menjadi penyebab krisis lingkungan Sahel.

Selama setengah abad terakhir, *United Nations Environment Programme* (UNEP) mencatat bahwa efek gabungan dari pertumbuhan penduduk, degradasi lahan (penggundulan hutan, penanaman terus menerus dan pastoralisme yang berlebihan), curah hujan yang berkurang maupun berlebihan dan tidak menentu, kurangnya kebijakan lingkungan yang koheren dan prioritas pembangunan yang salah tempat, telah berkontribusi untuk mengubah sebagian besar Sahel menjadi tanah tandus, sehingga mengakibatkan kerusakan sumber daya tanah dan air (Essoungou, 2013). Perlu diketahui juga bahwa degradasi lahan yang disebabkan penggurunan juga sering terjadi sebagai akibat dari kombinasi kekeringan dan salah urus lahan, terutama di mana tidak ada keselarasan antara penggunaan dan pengelolaan lahan di satu sisi dan iklim yang ada di sisi lain. Penggurunan terjadi terutama di zona iklim yang sangat kering, gersang, semi kering, dan sub-lembab (Abiodun et al., 2020).

Hal ini juga diperkuat dengan sebuah studi oleh Program Lingkungan PBB di mana Sahel merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap variabilitas curah hujan, degradasi lahan, dan penggurunan karena ketergantungannya yang tinggi pada pertanian dan peternakan tadah hujan. Adanya perubahan iklim ekstrem yang mana menyebabkan hujan lebat (badai petir yang hebat dan curah hujan di atas normal), membuat tanahnya terlalu kering untuk menyerap air yang naik, sehingga hal ini juga menyebabkan terjadinya banjir. Selain itu, perubahan iklim ini mengakibatkan lebih banyak ketidakpastian dalam ketersediaan air dan makanan (Chavara et al., 2015).

Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Sahel bervariasi dari tahun ke tahun dan dekade ke dekade, tetapi umumnya lebih rendah di utara (100–200 mm) daripada

di selatan (500–600 mm) dan terbatas pada bulan-bulan musim panas Juni–September. Lamanya musim hujan berkisar antara satu hingga dua bulan di utara dan empat hingga lima bulan di selatan. Di musim dingin (November–Maret), angin pasat Harmattan yang kering dan sarat debu bertiup dari timur laut ke barat daya, sehingga hal ini menyebabkan kondisi cuaca seperti gurun dan dapat menghasilkan debu/badai pasir yang parah (USAID, 2017). Maka dari itu, Sahel merupakan sumber angin nomor satu di dunia yang berupa debu mineral, dengan sensor satelit yang mendokumentasikan bahwa debu Sahel tidak hanya tersebar luas secara global tetapi juga merupakan planet bumi yang paling persisten dan padat (Epule et al., 2017).

Selain curah hujan yang bervariasi, wilayah Sahel juga dicirikan oleh panas yang konstan dan suhu yang tidak berubah karena jarang mengalami suhu dingin. Namun, selama periode terpanas, suhu tinggi rata-rata biasanya antara 36 dan 42°C (97 dan 108 °F), sedangkan suhu rendah rata-rata sekitar 25 hingga 31°C (77 hingga 88 °F). Selama "periode terdingin", suhu tinggi rata-rata adalah antara 27 dan 33°C (81 dan 91 °F) dan suhu rendah rata-rata antara 15 dan 21°C (59 dan 70 °F). Namun di Sahel, suhu rata-rata biasanya lebih dari 18°C (64°F) sementara itu mengalami rentang durasi sinar matahari yang sangat tinggi setiap tahun dan biasanya antara 2.700 jam (sekitar 61% siang hari) atau 3.500 jam (lebih dari 79% siang hari) (Abiodun et al., 2020). Durasi sinar matahari di Sahel mendekati tingkat gurun dan sebanding dengan di Gurun Arab, meskipun Sahel dikenal hanya padang rumput dan bukan gurun.

Di samping itu, dikarenakan kekeringan juga semakin parah pada wilayah Sahel di mana suhu naik 1,5 kali lebih cepat daripada di seluruh dunia, sehingga hal ini tentu

saja mengakibatkan mata pencaharian masyarakat Sahel terancam. Kebanyakan masyarakat wilayah Sahel hidup dari pertanian dan peternakan di bawah pengaruh gabungan dari kekeringan dan banjir, serta tanah yang memburuk dan kehilangan kesuburannya. Bahkan ketika irigasi tadah hujan tidak mencukupi mengakibatkan tanaman gagal atau hancur, sementara ternak juga berjuang untuk menemukan air untuk minum dan padang rumput yang cukup (OCHA, 2020).

Adanya variasi iklim yang kuat dan curah hujan yang tidak teratur membuat masyarakat Sahel harus mengadopsi strategi bertahan hidup, seperti menjual ternak, mengurangi makan, maupun mengeluarkan anak-anak dari sekolah. Hal tersebut membuat mereka lebih rentan dari waktu ke waktu (UN-OCHA, 2017). Kerentanan yang ada dapat membawa masyarakat Sahel jatuh ke dalam krisis.

Timbulnya perubahan iklim dan kapasitas adaptif yang rendah di wilayah Sahel berarti bahwa jika dibiarkan, perubahan iklim ini akan berdampak semakin negatif pada kehidupan dan mata pencaharian di seluruh wilayah. Kekeringan dan variabilitas iklim antar-tahunan yang tinggi telah sangat berkontribusi pada keterbelakangan berkelanjutan Sahel, dan dampak iklim sudah dirasakan di seluruh wilayah dalam bentuk penurunan hasil pertanian, hilangnya padang rumput, dan kekeringan. Situasi ini hanya akan memburuk jika tidak ada tindakan efektif untuk mengatasi kerentanan yang diuraikan di atas.

2.3.2 Dimensi Ekonomi

Wilayah Sahel merupakan salah satu bagian daerah termiskin dan paling rentan di dunia. Menurut data dari *World Bank*, Sahel memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita rata-rata berkisar antara \$400 hingga \$1000 per tahun (World Bank, 2014). Sekitar 40 persen populasi di wilayah Sahel hidup dengan kurang dari \$1,90 per hari. Sahel juga merupakan wilayah dengan pertumbuhan tercepat secara global (Bodewig, 2019).

Sektor pertanian merupakan aspek fundamental bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat Sahel. Ketergantungan ekonomi pada pertanian dan pastoralisme berarti bahwa mata pencaharian dan ketahanan pangan sangatlah bergantung pada cuaca dan kondisi lingkungan (Crawford, 2015). Tanaman lahan kering seperti millet, sorgum, kacang tunggak, dan tanaman komersial seperti kacang tanah dan kapas adalah produk pertanian yang dominan (OCHA, 2012). Selain itu, diperkirakan sekitar 50 juta orang bergantung pada penggembalaan untuk mata pencaharian mereka di Sahel dan pinggiran Sahara (De Haan et al., 2016). Namun dikarenakan cuaca yang tidak menentu dan buruknya kondisi lingkungan berakibat mata pencaharian masyarakat Sahel terancam sehingga banyak masyarakat yang semakin rentan dan menderita.

Selain merupakan wilayah termiskin, pemerintahan Sahel juga sangatlah buruk. Pemerintah rapuh yang tidak dapat menanggapi kebutuhan warga dapat memperburuk keluhan yang ada, meningkatkan ketegangan sosial dan mempercepat timbulnya kekerasan (Steadman, 2020). Selain itu pemerintah beserta lembaga-lembaganya

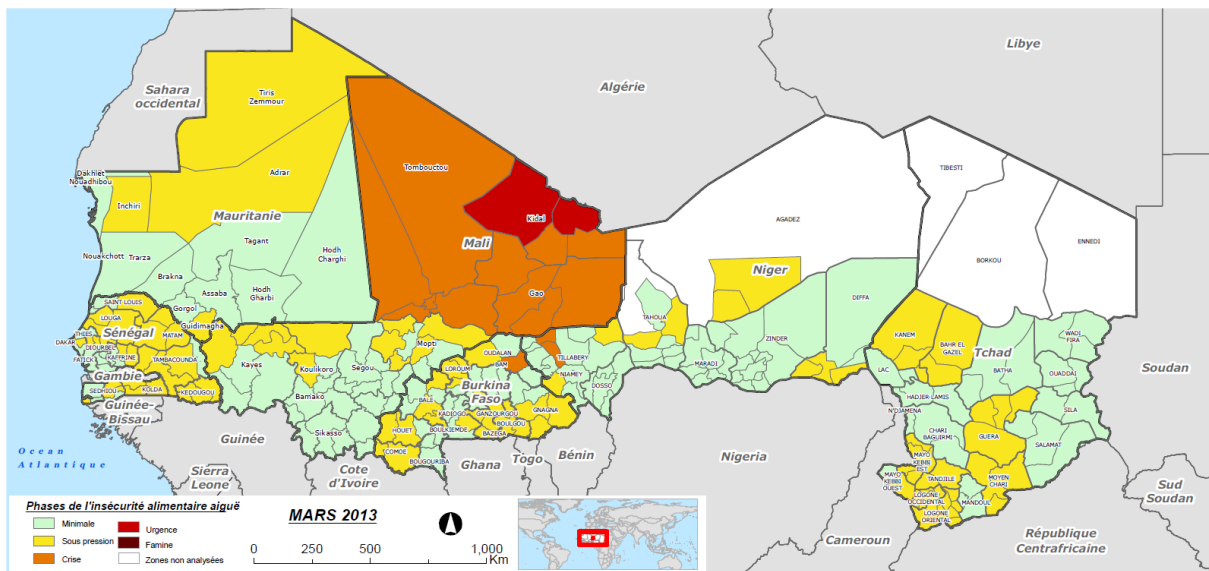
mengalami kekurangan dana dan kewalahan. Kegagalan pemerintah untuk membantu individu dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim akan semakin mengikis kontrak sosial dan pada gilirannya melemahkan legitimasi negara-negara di wilayah Sahel. Hal ini pada akhirnya pemerintah dapat dieksploitasi oleh kelompok teroris dan kejahatan terorganisir (Crawford, 2015).

2.4 Kondisi Krisis Kelaparan pada Wilayah sahel

Adanya variasi dan perubahan iklim di wilayah Sahel berpotensi memicu risiko berjenjang bagi mata pencaharian lokal (terutama pertanian dan penggembalaan) dan ketahanan pangan. Dengan kata lain, perubahan iklim dapat memperburuk tantangan yang ada di kawasan ini. Selain itu, peristiwa cuaca ekstrem dapat mengganggu produksi pertanian dan penggembalaan, dan membahayakan komunitas pedesaan yang rentan, khususnya perempuan dan kelompok terpinggirkan yang umumnya memiliki kesulitan yang lebih besar untuk mengatasinya (Cepero et al., 2021).

Hal ini bertambah buruk dengan adanya kemiskinan yang mengakibatkan krisis kemanusiaan terus berdampak pada wilayah Sahel. Hal ini membuat situasi pangan dan gizi menjadi genting dan rawan karena akses ke pangan sulit bagi rumah tangga yang paling rentan, bahkan situasinya diperkirakan semakin memburuk selama musim paceklik (Juni hingga September). Sehingga pada tahun 2013 diperkirakan bahwa sekitar 10,3 juta orang berada pada risiko kerawanan pangan dan gizi, dan lebih dari 1,4 juta anak berisiko mengalami malnutrisi akut parah sehingga mereka membutuhkan bantuan pangan segera dan dukungan mata pencaharian (FAO, 2013d).

Gambar 2.5 Kerawanan Pangan di Sahel tahun 2013



Sumber : FAO (2013d)

Di sisi lain, harga pangan yang tinggi di sebagian besar pasar di Sahel mengurangi daya beli rumah tangga yang paling rentan, terutama mereka yang memiliki akses sangat terbatas ke pertanian. Bahkan, ketahanan pangan terus terganggu dan dikombinasikan dengan akses yang tidak memadai ke layanan kesehatan (FAO & WFP, 2013). Adanya buta huruf dan kemiskinan juga menyebar di antara para penggembala dan petani yang merupakan sebagian besar penduduk. Bahkan konflik yang sedang berlangsung di Mali dan Danau Chad, dan perpindahan penduduk yang besar yang diakibatkannya di wilayah tersebut juga makin memperparah krisis yang terjadi di Sahel.

Selain itu, faktor alam yang ada yakni hujan selama bulan Juni 2013 yang ditandai dengan angin muson di Afrika Barat menyebabkan curah hujan yang sangat

tinggi hingga sedang di seluruh Sahel. Hujan deras yang menyebabkan banjir telah dilaporkan terjadi di Mali, Niger, dan Nigeria. Selain kerusakan rumah dan risiko kesehatan, di daerah pedesaan banjir ini telah mempengaruhi mata pencaharian rumah tangga (rusaknya tanaman pangan dan lahan pertanian hingga hilangnya ternak) (FAO & WFP, 2013).

Meskipun pada akhirnya produksi sereal kotor musim tanam 2012/13 di Sahel naik 37 persen dibandingkan tahun lalu dan 34 persen dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir. Situasi gizi akan tetap menjadi masalah yang sangat memprihatinkan di tahun 2013 karena hal ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat miskin maupun rumah tangga pedesaan yang sangat miskin (FAO, 2013e).

Sedangkan pada tahun 2014, aksesibilitas makanan masih menjadi perhatian utama bagi jutaan rumah tangga di Sahel. Dikarenakan pada tahun 2014, lebih dari 25 juta orang, mengalami rawan pangan. Di antara mereka, lebih dari 4,1 juta dalam situasi krisis sehingga membutuhkan makanan yang mendesak dan bantuan mata pencaharian. Hal ini juga dikarenakan produksi pertanian dari rumah tangga termiskin pada 2013 tidak cukup untuk memulihkan mata pencaharian mereka. Selain itu, mereka juga harus menghadapi musim paceklik (Juni-Agustus) dengan kadar makanan yang rendah dan cenderung menderita guncangan berulang seperti banjir, kekeringan, epidemi atau konflik. Akhir musim hujan di negara-negara tertentu di Sahel (Chad, Mauritania, dan Niger) telah memperpanjang musim paceklik, di mana memaksa rumah tangga yang rentan untuk mengadopsi mekanisme koping yang tidak dapat diubah jika mereka tidak memiliki akses ke bantuan makanan. Bahkan, selama musim paceklik, harga lokal

meningkat untuk Millet dan Sorgum di Burkina Faso dan untuk Millet di Mali (FAO, 2014d).

Sedangkan awal tahun 2015, muncul *Ebola Virus Disease* (EVD) di Afrika Barat dan hal ini ikut berimbas pada kesehatan masyarakat karena virus ini dapat menyebabkan kematian. Pada bulan Februari hingga Maret lebih dari 1,2 juta orang akan membutuhkan bantuan segera untuk melindungi mata pencaharian mereka dan mencegah kekurangan gizi. Angka ini akan mencapai 2,2 juta selama periode dari Juni hingga Agustus jika tindakan yang tepat tidak dilakukan. Di samping itu, empat bulan setelah akhir musim hujan, pengeringan dan penipisan padang rumput dan sumber air terus berlanjut, terutama di daerah yang mengalami defisit curah hujan yakni di Mali, Mauritania, Niger, dan Chad. Efek pertanian dan penggembalaan setelah defisit hujan yang tercatat di negara tersebut menyebabkan situasi ketahanan pangan dengan tingginya tingkat kerawanan pangan (FAO, 2015e).

Bahkan pada tahun 2015, musim paceklik pastoral berlanjut meskipun curah hujan membaik pada akhir Juli 2015, terutama di wilayah utara di Chad dan Mauritania, yang mengalami defisit besar. Sayangnya, curah hujan sejak akhir Juli menyebabkan banjir di wilayah tersebut. Hujan lebat pada akhir Juli-awal Agustus menyebabkan banjir di beberapa daerah di seluruh wilayah dengan 83.843 orang terkena dampak dan lebih dari 600 hektar tanaman hancur. Negara yang paling terkena dampak adalah Burkina Faso (20.346 orang) dan Niger (20.089 orang) (FAO, 2015f).

Namun, meskipun demikian, Sahel masih ditandai dengan daerah kekeringan. Situasi pastoral di Sahel terus ditandai dengan berlanjutnya masa paceklik dengan

kematian ternak yang dilaporkan di Burkina Faso dan Mali. Selain itu, beberapa negara di wilayah Sahel juga terjangkit wabah flu burung H5N1 yang awalnya menyebar di negara Pantai Gading dan Ghana (FAO, 2016d). Pada akhirnya wabah flu burung H5N1 turut menyebar di Burkina Faso dan Nigeria. Hal lain juga memperburuk situasi pada tahun ini di mana konflik dan ketidakamanan sipil di Mali dan di Danau Chad terus berdampak negatif pada situasi pangan penduduk terlantar dan masyarakat sekitar (FAO, 2015e).